

# IS Sulit Ditaklukkan

Oleh Chusnan Maghribi

**TEROR** maut di tujuh lokasi di Ibukota Prancis, Paris, yang menewaskan tak kurang dari 129 warga pada Jumat (13/11) lalu, memunculkan efek serius berupa reaksi tegas dan keras cenderung galak pemerintah Perancis. Tak lama setelah tragedi, aparat keamanan menyisir keluarga-keluarga yang diduga menjalin kekerabatan dengan para pelaku teror. Sebagian dari mereka ditangkap dan ditahan.

Pihak keamanan memperketat kontrol dan pemeriksaan lalu lintas penduduk di tempat-tempat tertentu, semisal bandara, stasiun kereta api, dan area publik strategis lain. Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve memutuskan untuk menutup masjid-masjid yang dipakai sebagai tempat radikalisasi warga serta mengusir imam-imam yang mempropagandakan kebencian.

Ke luar, hanya berselang dua hari pascateror Paris yang diklaim sebagai



perbuatan kelompok ekstremis Islamic State (IS), Presiden Francois Hollande memerintahkan kekuatan Angkatan Udara (AU) yang tergabung dalam aliansi melawan kelompok mili-

tan IS di Irak dan Suriah untuk menggempur habis posisi-posisi kunci IS, seperti gudang amunisi dan tempat-tempat pelatihan khususnya di Raqqa, Suriah.

Reaksi keras pemerintah Prancis tersebut mirip dengan reaksi pemerintah Amerika Serikat (AS) saat terjadi tragedi World Trade Center (WTC) 11 September 2001, tetapi berbeda jauh dari respon pemerintah Turki saat terjadi serangan bom di Ankara yang juga (diyakini) dilakukan oleh militan IS yang merenggut nyawa lebih dari 120 warga Kurdi yang tengah berdemonstrasi 12 Oktober 2015 lalu. Pemerintah Turki tidak serta-merta menggempur posisi-posisi IS setelah tragedi bom Ankara.

Reaksi keras pemerintah Prancis tentu mudah dipahami. Pasalnya, serangan teror 13 November lalu tercatat sebagai serangan teror kali keenam sepanjang tahun ini. Belum lekap dari ingatan kita, 7 Januari 2015 kantor redaksi majalah Charlie Hebdo diserang brutal menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai 22 orang lain. Setelah itu berturut-turut terjadi serangan terhadap komunitas Yahudi di Paris 3 Februari, penembakan di sebuah gereja di Kota Villejuif menewaskan seorang jemaat 19 April, serangan bom bunuh diri 26 Juni di Saint Quentin juga menewaskan satu orang, serta penembakan di kereta api rute Paris-Amsterdam 21 Agustus melukai empat orang.

Selain itu, dibanding dengan rangkaian teror yang terjadi dalam upaya pembunuhan Napoleon Bonaparte pada 24 Desember 1800, serangan teroris 13 November 2015 dinilai oleh sebagian warga Prancis sebagai lebih mencekam dan mengerikan. Masuk akal serangan teroris 13 November lalu dianggap sebagai serangan terburuk sepanjang sejarah Negeri Anggur itu.

Di luar itu semua, serangan teroris 13 November sangat berdekatan waktunya dengan perhelatan akbar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Perubahan Iklim yang akan digelar di Paris 30 November sampai 11 Desember ini. Banyak kepala negara maupun kepala pemerintahan

seperti Presiden AS Barack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan hadir dalam KTT Perubahan Iklim.

Karenanya, serangan terhadap 'jantung' Republik Prancis 13 November lalu sejatinya menjadi tamparan sangat telak dan superberat bagi pemerintah dan dinas intelijen Prancis. Sebuah pemerintah dari negara semaju Prancis masih bisa kecolongan oleh aksi bengis dan sadis teroris.

Oleh sebab itu, sekali lagi, reaksi (respon) keras dan galak pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan Presiden Hollande atas teror maut di Paris sungguh mudah dimengerti. Persoalannya, apakah reaksi galak terutama terkait serangan AU Prancis terhadap posisi-posisi IS di Suriah akan efektif?

Persoalan (pertanyaan) itu muncul mengingat IS di Irak maupun Suriah sejauh ini telah membuktikan sebagai sebuah kekuatan tempur yang liat, sulit ditaklukkan. Sekitar setahun terakhir, mulai September 2014, sejak Prancis memprakarsai dan menabuh genderang perang melawan IS, belum tampak tengara IS akan bertekuk-lutut. Malah cengeraman kekuasaan mereka atas sejumlah wilayah (provinsi) di Suriah semisal Raqqa, Aleppo, dan Deir Al-Zor semakin nyata. IS bukan saja berani menetapkan Raqqa sebagai ibukota negara, melainkan juga menutup sekolah-sekolah di bawah pemerintahan Bashar Al-Assad sekaligus menyelenggarakan kegiatan pendidikan baru dengan kurikulum baru di wilayah-wilayah yang dikontrolnya. Menurut juru bicara Unicef, Christophe Boulierac, sekitar 670.000 anak di Suriah kehilangan pendidikan akibat kebijakan IS tadi.

Jadi singkatnya, tidak (belum) ada jaminan reaksi keras Prancis atas teror Paris, terutama terkait serangan udaranya ke posisi-posisi IS akan efektif lantaran kelompok militan IS sejauh ini telah membuktikan sulit untuk ditaklukkan oleh kekuatan manapun. (43)

— Chusnan Maghribi, alumnus Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta